

Nama : Mayke Riansyah

NPM : 2413031047

Kelas : 2024 B

Jawaban Studi Kasus Pertemuan 9

1) Analisis perilaku manajemen memilih kebijakan konservatif motivasi & dampak

Motivasi perilaku :

Risk-aversion & reputasi manajemen konservatif cenderung mengakui biaya reklamasi lebih awal/lebih besar untuk mengurangi risiko reputasi, hukum, dan sanksi lingkungan (menghindari “surprise” liabilitas).

Agency / insentif internal manajemen yang menghadapi target jangka pendek atau insentif manajemen bisa memilih kebijakan yang menjaga keberlanjutan operasi (mis. penyisihan cadangan) daripada memaksimalkan laba sekarang.

Norma organisasi & kepatuhan regulasi kewajiban reklamasi diatur ketat di Indonesia sehingga sikap konservatif mencerminkan kepatuhan terhadap norma legal dan sosial (kewajiban jaminan reklamasi, denda/sanksi).

Potensi dampak pada stakeholders:

Investor asing agresif: melihat laba lebih rendah → tekanan sell/keberatan; namun konservatif mengurangi risiko liabilitas di masa depan.

Masyarakat lokal / lingkungan: mendapat kepastian reklamasi lebih baik bila perusahaan konservatif.

Pemerintah & regulator: konservatif memudahkan kepatuhan dan mengurangi risiko sanksi.

Pemegang saham jangka pendek: mungkin kecewa karena laba lebih rendah; pemegang saham jangka panjang cenderung menghargai pengelolaan risiko.

(Aspek-aspek perilaku bias, kepercayaan, beban kognitif dijelaskan dalam literatur akuntansi perilaku).

2) Jika Anda akuntan perusahaan: sikap terhadap tekanan investor luar negeri

Langkah praktis & etis:

1. Tinjau fakta & standar yang berlaku — periksa apakah perubahan pengakuan yang

diminta sesuai IAS 37 / IFRS (provisions: pengakuan jika ada kewajiban sekarang, estimasi and discounting). Jika tidak memenuhi kriteria, tidak boleh diakui.

2. Dokumentasikan estimasi & judgment catat asumsi, metode diskonto, dan sensitivitas. Transparansi mengurangi konflik.

3. Konsultasi dengan auditor independen / komite audit — minta pendapat teknis tertulis; jangan membuat perubahan hanya karena tekanan eksternal.

4. Komunikasi terbuka ke investor jelaskan alasan konservatif, risiko lingkungan, dan konsekuensi jangka panjang bagi nilai perusahaan.

5. Pertimbangkan kode etik profesi (NOCLAR & IESBA) jika permintaan investor mendorong pengabaian kewajiban hukum/lingkungan atau memanipulasi pengungkapan, akuntan wajib menolak dan mengikuti prosedur NOCLAR.

Apakah mengikuti investor melanggar etika?

Jika perubahan memenuhi standar akuntansi & pengungkapan yang jujur → tidak otomatis melanggar etika.

Jika perubahan dimotivasi untuk menyembunyikan kewajiban, menyesatkan pemakai laporan, atau melanggar hukum/regulasi → bertentangan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan kewajiban bertindak demi kepentingan publik menurut Code of Ethics (IESBA) dan aturan NOCLAR. Dalam kasus seperti itu akuntan harus menolak dan melaporkan sesuai prosedur.

3) Bagaimana ekonomi-politik memengaruhi proses penetapan standar contoh kasus & nyata

Inti: standard-setting adalah proses teknis + politik aktor yang kuat (industri, investor besar, pemerintah) dapat mendorong hasil yang menguntungkan kepentingan mereka. IFRS mengklaim due process terbuka, tetapi tekanan politik/ekonomi tetap ada.

Dalam kasus PT Lestari Mineral:

Pemerintah Indonesia merumuskan standar nasional yang menekankan keberlanjutan → asosiasi industri menekan agar standar tidak membebani biaya tinggi (political lobbying). Hasilnya bisa berupa kompromi: standar yang “tampil hijau” tetapi lemah di enforcement. (ilustrasi nyata: proses adopsi/penyesuaian SAK/PSAK sering dipengaruhi aktor domestik).

Contoh lain dunia nyata:

Perdebatan LIFO/IFRS di AS tekanan ekonomi dan politik dari industri mempengaruhi perbedaan antara US-GAAP dan IFRS (LIFO dilarang di IFRS; lobby AS menahan adopsi penuh IFRS).

Revenue recognition / lease accounting panjangnya proses, banyak lobbying dari perusahaan besar dan regulator karena dampak ekonomi nyata. (lihat kajian politik standard-setting).

4) Perbandingan: standard-setting berbasis prinsip (IFRS) vs berbasis aturan (GAAP) mana lebih relevan untuk Indonesia?

Perbedaan :

Prinsip (IFRS): kerangka umum, butuh judgment, lebih fleksibel dan fokus pada substansi & pengungkapan.

Aturan (GAAP-style): detail, preskriptif, lebih sedikit ruang interpretasi membantu konsistensi tetapi kurang adaptif.

Lebih relevan menerapkan pendekatan berbasis prinsip (IFRS-aligned SAK/PSAK) karena:

1. Kompatibilitas global mendukung investor internasional dan pasar modal.
2. Fleksibilitas untuk isu keberlanjutan/lingkungan masalah reklamasi dan pengukuran liabilitas memerlukan judgement profesional (estimasi arus kas, asumsi diskonto, risiko).
3. Namun: prinsip memerlukan institusi kuat, good governance, dan kapasitas regulator/auditor untuk mencegah penyalahgunaan bila kelembagaan lemah, diperlukan tambahan pedoman aplikatif lokal (rule-based supplements) dan penegakan.